

Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi**Dewi Maharani**

Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

Email: dewimaharani922@gmail.com**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menemukan beberapa solusi dalam masalah sosial-ekonomi. Ini berfokus pada konsep ekonomi Islam. Sejarah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sangat efektif untuk memulihkan berbagai jenis masalah sosial ekonomi, karena diimplementasikan sesuai Alquran dan Hadis. Jika ekonomi Islam diimplementasikan dengan baik dan benar, banyak masalah sosial ekonomi yang penting dapat diantisipasi. Karena ekonomi Islam dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga setiap masalah sosial ekonomi tidak akan sesuai jika ekonomi Islam diimplementasikan dengan baik dan benar.

Artikel Info**Received:**

15 Februari 2018

Revised:

13 Maret 2018

Accepted:

19 Mei 2018

Keyword: Masalah sosial ekonomi, solusi Ekonomi Islam.**A. Pendahuluan**

Pemenuhan hajat manusia di permukaan bumi secara kooperatif telah dirasakan dan telah diakui sebagai faktor esensial agar dapat bertahan dalam kehidupan. Seluruh manusia bergantung dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ketergantungan mutualistik dalam kehidupan individu dan sosial diantara manusia telah melahirkan sebuah proses evolusi bertahap dalam pembentukan sistem pertukaran barang dan pelayanan. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia dari

zaman ke zaman, sistem pertukaran ini berevolusi dari aktivitas yang sederhana kepada aktivitas ekonomi yang modern.

Ilmu ekonomi konvensional telah memberikan kontribusi yang amat besar bagi kemajuan kehidupan manusia secara materiil, terutama sesudah Perang Dunia II. Pada masa ini, revolusi ekonomi mampu memberikan kesejahteraan kepada manusia, bersamaan dengan meningkatnya produksi, membaiknya sarana komunikasi dan bertambahnya kemampuan eksploitasi sumber daya alam. Standar hidup di antara kelas

pekerja menjadi lebih tinggi daripada bila mereka hanya bergantung pada pertanian. Tetapi pada perkembangannya, ekonomi konvensional terbukti gagal mempertahankan idealismenya. Kondisi-kondisi ideal yang dijadikan asumsi dalam teori ekonomi konvensional tidak pernah tercapai. Bahkan pada setengah abad terakhir, ekonomi konvensional semakin menampakkan kelemahannya. Timbulnya kapitalisme memperbesar kesenjangan antar orang kaya dan orang miskin, antara pekerja dan pemilik modal, antara negara maju dan negara berkembang serta menyebabkan tingginya inflasi dan bertambahnya jumlah pengangguran.

Sebuah lembaga riset yang berkedudukan di Inggris *The New Economics Foundation* (NEF), menunjukkan hasil penelitiannya tentang hubungan antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan proporsi atau *share* dari pertumbuhan tersebut yang dinikmati oleh kaum miskin, menemukan dan membuktikan bahwa pada dekade 1980-an, dari setiap kenaikan 100 \$ AS pendapatan per kapita dunia, maka

kaum miskin hanya menikmati 2,2 \$ AS, atau sekitar 2,2 persen. Artinya 97,8 persen lainnya dinikmati oleh orang-orang kaya. Kemudian pada tahun 1990 hingga 2001, setiap kenaikan pendapatan per kapita sebesar 100\$ AS, maka persentase yang dinikmati oleh orang-orang miskin hanya 60 persen saja, atau sekitar 0,6 persen. Sedangkan sisanya, yaitu 99,4 persen, dinikmati oleh kelompok kaya dunia. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan *share* kelompok miskin sebesar 73 persen dan hingga saat sekarang ini kesenjangan tersebut semakin menjadi-jadi.

Fakta ini menjelaskan bahwa perekonomian dunia saat ini cenderung pada ketidakseimbangan penguasaan aset dan sumber daya ekonomi, dengan begitu terjadi kesenjangan yang signifikan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Kelompok kaya menjadi semakin kaya dan kelompok miskin semakin miskin. Ironisnya fakta tersebut paralel dengan kenyataan di banyak negara Muslim, di mana strategi *trickle down effect* yang dahulu begitu diagung-agungkan, ternyata hanya menghasilkan kesenjangan sosial yang

luar biasa besar.¹

Dalam kondisi seperti ini, maka selama tiga atau empat dekade terakhir mulai dikembangkan system perekonomian Islam sebagai solusi perekonomian internasional.

Alquran sebagai kitab suci umat Islam memberikan petunjuk yang sempurna (komprehensif) dan abadi (universal) bagi seluruh umat manusia. Alquran mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang fundamental untuk setiap permasalahan manusia, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi yang ada dalam berbagai ayat di Alquran dilengkapi dengan sunah-sunah dari Rasulullah s.a.w. melalui berbagai bentuk Hadis dan diterangkan lebih rinci oleh para fuqaha pada saat kejayaan *dīnu al-Islām* baik dalam bentuk Ijma atau Qiyas maupun Ijtihad.²

Pada masa Rasulullah Saw, Islam memberikan ruang yang sangat

luas bagi berkembangnya perekonomian. Salah satu prinsip dasar dalam muamalah adalah bahwa segala sesuatu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, menjadi pendorong utama inovasi ekonomi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi Islam.

Pada masa Khulafaur al-Rashidin, masyarakat mencapai taraf kesejahteraan yang tinggi, yang semakin bertambah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ekonomi Islam mencapai puncak kejayaannya seiring dengan kejayaan Islam secara keseluruhan pada masa khalifah Harun al-Rashid. Pada masa ini, aktivitas-aktivitas komersial berkembang sampai ke Cina. Ketersediaan bantuan keuangan yang melimpah bagi para mahasiswa dan sarjana menjadikan dunia muslim sebagai suatu tempat pertemuan bagi para sarjana dari segala bidang pengajaran dan berbagai aliran dan agama. Keadilan dalam sistem perpajakan pertanian menghasilkan tingginya produksi pertanian dan meningkatnya kesejahteraan petani.³

Namun berbagai permasalahan

³ Al-Ashfahani, *Al-Aghāny*, Juz: IX. (Kairo: Dār al-Sha'b, tt).

¹ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I, 1986), h. 65.

² Mohammad Umar Chapta, *Islam and the Economics Challenge* (Nigeria: The Islamic Foundation and The International Insitute of Islamic Thought, 1992), h. 54.

internal dan eksternal umat Islam, melemahkan ekonomi Islam dan menghentikan perkembangan ekonomi Islam selama satu setengah abad. Berdasarkan sejarah yang menunjukkan efektifitas sistem perekonomian Islam bila dilaksanakan sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sistem ekonomi Islam kembali dilirik sebagai solusi berbagai permasalahan sosial ekonomi internasional. Jika instrumen ekonomi Islam diimplementasikan dengan baik dan benar, maka masalah-masalah krusial perekonomian dapat diantisipasi sehingga tidak menimbulkan krisis ekonomi maupun finansial sebagaimana yang saat ini tengah terjadi. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Pembahasan

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi didefinisikan sebagai hal yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Sementara, Islam mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di

dunia maupun akhirat. Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian dari agama (Islam), karena bagian dari kehidupan manusia yang bersumber dari Alquran dan al-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan *al-Qur'ān al-karīm* dan *al-Sunnah al-nabawiyah*.⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Ekonomi Islam itu adalah sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, bagi setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan barang & jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Jika dilihat dari tujuannya, sekilas tidak ada perbedaan antara ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya, yaitu untuk mencari pemenuhan berbagai keperluan hidup

⁴ Misanam, Munrokhim, *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 32.

manusia, baik bersifat pribadi atau kolektif. Demikian juga dengan prinsip dan motifnya, di mana setiap orang atau masyarakat berusaha mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau biaya yang sekecil-kecilnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun sesungguhnya ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain. Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas tentang definisi ekonomi Islam dari berbagai ahli ekonomi Muslim terkemuka saat ini. Definisi ekonomi Islam yang diberikan oleh mereka bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.⁵
- 2) Ekonomi Islam sebagai cabang dari ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan

⁵ Muhammad Abdul Mnnan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I, 1986).

ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.⁶

- 3) Ekonomi Islam merupakan studi mengenai representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu.
- 4) Mohammad Akram Khan, menegaskan bahwa ekonomi Islam merupakan studi yang memusatkan perhatian pada kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi ini atas dasar kerjasama dan partisipasi.⁷

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh

⁶ Mohammad Umar Chapra, *Islam and the Economics Challenge*. (Nigeria: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992), h. 87.

⁷ Mohammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*. (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1994), h. 32.

individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam dan mencakup cara pandang permasalahan ekonomi dalam menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Terkait dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam, sebagai berikut:⁸

1) Nilai-Nilai Universal: Teori

Ekonomi

Ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: *Tauhid* (Keesaan Tuhan), *'Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilāfah* (Pemerintahan) dan *Ma'ad* (Hasil). Kelima dasar ini menjadi inspirasi untuk menyusun proposisi dan teori ekonomi Islam.

a. *Tauhid* (Keesaan Tuhan). *Tauhid* merupakan fondasi ajaran Islam.

Allah pemilik alam semesta dan semua sumber daya yang

ada karena Allahlah yang menciptakan alam semesta dan beserta isinya. Dalam Islam semua yang diciptakan Allah ada manfaat dan tujuannya. Karena itu segala aktivitas yang ada hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (muamalah) dibingkai dalam kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. *'Adl* (Keadilan). Dalam Islam, *'adl* didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Para pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan dan akan menzalimi sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.

c. *Nubuwwah* (Kenabian). Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan bimbingan

⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 65.

dan petunjuk dari Allah tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal muasal segala, yaitu Allah. Kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul. Sifat-sifat Rasul yang harus diteladani, yaitu: *siddīq* (benar, jujur), *amānah* (bertanggungjawab, *credible*), *fatānah* (cerdas, bijaksana, intelek) dan *tablīgh* (komunikatif, terbuka, ahli marketing).

- d. *Khilāfah* (Pemerintahan). Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, karena itu pada dasarnya manusia adalah pemimpin. Dalam Islam pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan Syariah dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka pencapaian *maqāsid shari'ah*

yaitu memajukan kesejahteraan manusia.

- e. *Ma'ad* (Hasil). Hidup manusia tidak hanya di dunia, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan berlipat-lipat, perbuatan jahat akan mendapat hukuman yang setimpal. Prinsip ini menjadi motivasi dalam ekonomi dan bisnis, bahwa laba tidak hanya laba dunia tetapi meliputi laba akhirat. Karena itu konsep *profit* mendapat legitimasi dalam Islam.

2) Prinsip-Prinsip Derivatif: Ciri-ciri Sistem Ekonomi Islam.

Dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah: *multiple ownership*, *freedom to act* dan *social just*.

- a. *Multiple Ownership* (Kepemilikan dengan Berbagai Jenis).

Prinsip ini terjemahan dari nilai Tauhid: pemilik primer langit dan bumi dan seisinya adalah Allah s.w.t, sedangkan manusia diberi amanah

untuk mengelolanya. Manusia dianggap sebagai pemilik sekunder, dengan demikian dalam ekonomi Islam kepemilikan pribadi atau swasta diakui.

b. *Freedom to Act* (Kebebasan untuk Berusaha).

Pelaku-pelaku ekonomi yang menjadikan nabi dan rasul sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya akan melahirkan pribadi-pribadi profesional dan prestatif dalam segala bidang. Prinsip *freedom of act*. *Freedom of act* akan menciptakan mekanisme pasar, dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman). Potensi distorsi dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan. Negara bertugas untuk menyingkirkan atau mengurangi *market distortion* dan bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (*mu'āmalah*) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis untuk menjamin tidak dilanggarnya syariah, sehingga tercipta iklim ekonomi yang sehat.

c. *Social Justice* (Keadilan Sosial).

Gabungan nilai *khilāfah* dan *ma'ad* melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya

dan menciptakan keseimbangan sosial si kaya dan si miskin. Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil.

3) Akhlak: Perilaku Islami dalam Perekonomian.

Semua nilai dan prinsip di atas dipayungi oleh konsep akhlak. Oleh karena itu tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Namun harus dicermati, walaupun sistem ekonomi Islam mempunyai landasan yang kuat dan prinsip-prinsip ekonomi yang mantap bukan jaminan perekonomian umat Islam akan otomatis menjadi maju.

Sistem ekonomi Islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Tetapi kinerja bisnis tergantung pelaku ekonomi, yang memungkinkan dipegang oleh orang nonmuslim. Perekonomian umat Islam baru dapat maju bila pola pikir dan pola tingkah laku muslimin dan muslimat sudah profesional (*ihsān, itqān*). Akhlak

menjadi indikator, penentu keberhasilan bisnis yang dijalankan.

3. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi konvensional telah menyusun dua tujuan yakni pertama bersifat positif dan berhubungan dengan realisasi efisiensi dan pemerataan dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya. Dan kedua normatif dan diungkapkan dalam bentuk tujuan sosioekonomi yang secara universal diinginkan, seperti pemenuhan kebutuhan, keadaan kesempatan kerja penuh, laju pertumbuhan ekonomi yang optimal, distribusi pendapatan yang adil (merata), stabilitas ekonomi dan keseimbangan lingkungan hidup.⁹

Kedua tujuan tersebut sepintas sangat ideal, karena melayani kebutuhan individu dan masyarakat. Namun dalam prakteknya, kedua tujuan ini menjadi tidak konsisten. Bahkan negara-negara yang kaya ternyata tidak mampu memenuhi tujuan normatifnya, sekalipun mereka memiliki sumber-sumber daya yang besar. Jika sebagian tujuan ini terwujud, hal ini hanya dapat dilakukan

dengan merugikan tujuan yang lain. Misalnya, tujuan efisiensi dengan penggunaan mesin industri diperoleh dengan merugikan tujuan perluasan kesempatan kerja, atau sebaliknya. Bukti-bukti menunjukkan bahwa kegagalan ini semakin nyata di seluruh belahan dunia.

Ekonomi Islam, berkonsentrasi pada merealisasikan *maqāsid sharī'ah* dan alokasi sumber-sumber daya seperti pada ekonomi konvensional. Tujuan utama Syariah (*maqāsid sharī'ah*) adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan terhadap agama mereka (*dīn*), diri (*nafs*), akal, keturunan (*nasl*) dan harta benda (*māl*). Dengan berpatokan pada penjelasan *maqāsid sharī'ah* di atas, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan ekonomi Islam itu sebagai berikut:

- 1) Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar pemikiran yaitu: QS. al-Baqarah ayat 2 & 168, al-Maidah ayat 87-88, al-Jumu'ah ayat 10).
- 2) Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (dasar

⁹ Mohammad Umar Chapra, *Islam and the Economics Challenge* (Nigeria: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992), h. 89.

pemikiran yaitu: QS. al- Hujurāt ayat 13, al-Maidah ayat 8, al-Shu'arā' ayat 183).

- 3) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (dasar pemikiran yaitu: QS. al-An'am ayat 165, al-Nahl ayat 71, al-Zukhruf ayat 32).
- 4) Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (dasar pemikiran yaitu: QS. al-Ra'du ayat 36, Luqman ayat 22).

4. Ekonomi Islam Berbasis Sektor Riil

Dalam ekonomi Islam, sektor finansial selalu mengikuti pertumbuhan sektor riil. Perbedaan konsep inilah ekonomi dunia menjadi rawan terhadap krisis. Hal ini disebabkan karena pelaku ekonomi menggunakan uang yang bukan untuk kepentingan sektor riil, tetapi untuk kepentingan spekulasi mata uang semata. Akibat spekulasi tersebut, jumlah uang yang beredar sangat tidak berimbang dengan jumlah barang pada sektor riil. Uang, dalam pandangan Islam, bukanlah komoditas (barang dagangan) melainkan alat pembayaran.

Islam menolak keras segala jenis transaksi semu seperti yang terjadi di pasar uang atau pasar modal saat ini.

Sebaliknya, Islam mendorong perdagangan internasional. Muhammad s.a.w, sebelum menjadi rasul, telah menjadi pedagang internasional sejak usia remaja. Ketika berusia belasan tahun, beliau telah berdagang ke Syam (Suriah), Yaman dan beberapa negara di kawasan Teluk. Lalu saat beliau menjadi rasul sekaligus menjadi kepala negara *Daulah Islamiyah* di Madinah, sejak awal kekuasaannya, umat Islam telah menjalin kontak bisnis dengan Cina, India, Persia dan Romawi. Bahkan hanya dua abad kemudian (abad kedelapan), para pedagang Islam telah mencapai Eropa Utara.

Pada zaman khalifah Umar bin al-Khattab dan khalifah Uthman bin 'Affan, sering mengalami surplus. Hal ini dikarenakan kebijakan moneter *daulah islāmiyah* masa Rasulullah s.a.w. dan Kekhilafahan Islam pada masa para khalifah selalu terkait dengan sektor riil, terutama perdagangan.¹⁰

5. Ekonomi Islam Menjamin Kesejahteraan Umat Manusia

Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan diukur berdasarkan pada prinsip terpenuhinya kebutuhan setiap

¹⁰ Pertadireja, *Pengantar Ekonomika*. (Yogyakarta: BPF, 1994), h. 64.

individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil. Oleh karena itu, untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan setiap individu masyarakat, maka ekonomi Islam dilakukan dengan melaksanakan hal-hal berikut ini:¹¹

1) Pengaturan atas Kepemilikan.

Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi tiga. *Pertama*: kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, seperti minyak, besi, tembaga, emas dan gas; termasuk semua yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya. Dalam hal ini, negara hanya mengeksplorasi dan mendistribusikannya kepada rakyat, baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Kedua: kepemilikan negara

meliputi semua kekayaan yang diambil negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri dan pertanian yang diupayakan oleh negara, di luar kepemilikan umum. Semuanya ini dibiayai oleh negara sesuai dengan kepentingan negara.

Ketiga: kepemilikan individu dikelola oleh individu sesuai dengan hukum syariah

2) Penetapan Sistem Mata Uang Emas dan Perak.

Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam. Mengeluarkan kertas substitusi harus ditopang dengan emas dan perak, dengan nilai yang sama dan dapat ditukar, saat ada permintaan. Dengan begitu, uang kertas negara manapun tidak akan dapat didominasi oleh uang negara lain. Sebaliknya, uang tersebut mempunyai nilai intrinsik yang tetap dan tidak berubah. Mengganti mata uang emas dan perak dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian negara. Dominasi mata uang dolar yang tidak ditopang secara langsung oleh emas mengakibatkan struktur ekonomi menjadi sangat rentan terhadap gejolak mata uang dolar.

¹¹ Abul Hasan and Muhammad Sadeq, *Economic Growth in an Islamic Economy, Dalam Development and Finance in Islam*. (Malaysia: International Islamic University Press, 1987), h. 97.

Goncangan sekecil apapun yang terjadi dengan cepat merambat ke seluruh dunia. Bukan hanya itu, gejolak politik pun akan berdampak pada naik-turunnya nilai mata uang akibat uang dijadikan komoditas (barang dagangan) di pasar uang yang penuh spekulasi (untung-untungan).

3) Penghapusan Sistem Ribawi

Ekonomi Islam melarang riba, baik *nasī'ah* maupun *fadh*; juga menetapkan pinjaman untuk membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa tambahan (bunga) dari uang pokoknya. Di baitulmal (kas negara *daulah islāmīyah*), masyarakat dapat memperoleh pinjaman bagi mereka yang membutuhkan, termasuk para petani, tanpa ada unsur riba sedikitpun di dalamnya.

4) Pengharaman Sistem Perdagangan di Pasar Non-Riil.

Adapun yang termasuk ke dalam pasar non-riil (*virtual market*) saat ini adalah pasar sekuritas (surat-surat berharga); pasar berjangka (komoditas emas, CPO, tambang dan energi dan lain-lain) dan pasar uang. Ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum barang menjadi milik dan dikuasai oleh penjualnya,

haram hukumnya menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang. Haram memindahtangankan kertas berharga, obligasi dan saham yang dihasilkan dari akad-akad yang batil. Islam juga mengharamkan semua sarana penipuan dan manipulasi yang dibolehkan oleh Kapitalisme, dengan klaim kebebasan kepemilikan. Inilah Ekonomi Islam yang benar-benar akan menjamin kesejahteraan masyarakat dan bebas dari guncangan krisis ekonomi.

6. Solusi yang Ditawarkan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka solusi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Pertama, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*). Islam mencapai *pro-poor growth* melalui dua jalur utama: pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Bersama dengan itu, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerja sama

ekonomi dan bisnis seperti *mudārabah*, *muzāra'ah* dan *musāqah*. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Kedua, Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak pada kepentingan rakyat banyak (*pro-poor budgeting*). Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai *pro-poor budgeting* yaitu: disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik. Tidak pernah terjadi defisit anggaran dalam pemerintahan Islam walau tekanan pengeluaran sangat tinggi, kecuali sekali saja, pada masa pemerintahan Nabi Muhammad s.a.w, yang disebabkan oleh peperangan. Bahkan pada masa Khalifah Umar dan Uthman terjadi surplus anggaran yang besar. Yang kemudian lebih banyak didorong adalah efisiensi dan penghematan anggaran melalui *good governance*. Di dalam Islam, anggaran negara adalah harta publik sehingga anggaran menjadi sangat responsif terhadap kepentingan orang miskin.

Ketiga, Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*). Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian. Nabi Muhammad s.a.w. membagikan tanah di Madinah kepada masyarakat untuk membangun perumahan, mendirikan permandian umum di sudut kota, membangun pasar, memperluas jaringan jalan, dan memperhatikan jasa pos. Khalifah Umar bin Khattab membangun kota Kufah dan Basrah dengan memberi perhatian khusus pada jalan raya dan pembangunan masjid di pusat kota. Beliau juga memerintahkan Gubernur Mesir, Amr bin Ash, untuk mempergunakan sepertiga penerimaan Mesir untuk pembangunan jembatan, kanal dan jaringan air bersih.

Keempat, Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public services*). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius: birokrasi, pendidikan dan kesehatan.

Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Khalifah Usman tidak mengambil gaji dari kantornya. Khalifah Ali membersihkan birokrasi dengan memecat pejabat-pejabat publik yang korup. Selain itu, Islam juga mendorong pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai sumber produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kelima, Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin. Terdapat tiga instrument utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak dan wakaf.

C. Penutup

Berbagai kajian tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat ditemukan dalam konsep ekonomi Islam. Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Alquran, Sunnah Nabi s.a.w. maupun pemikiran-pemikiran ulama Islam

terdahulu. Namun kemunculan kembali konsep ini, khususnya beberapa dasawarsa belakangan ini, berkaitan erat dengan kondisi negara-negara muslim yang terbelakang. Untuk menghadapi ini, diperlukan formula khusus dalam strategi dan perencanaan pembangunannya.

Kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumber daya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat. Jadi, ekonomi Islam lebih ditekankan pada suatu konsep dan usaha untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam adalah jawaban tantangan peradaban dunia.

Daftar Pustaka

Al-Ghazali, 1422 H. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Uslul*, Jilid II. Kairo: Amiriyyah. Al-Ashfahani. TT. *Al-Aghāny*, Juz: IX. Kairo: Dār al-Sha'b.

- Chapra, Mohammad Umar, 1992. *Islam and the Economics Challenge*. Nigeria: The Islamic Foundation and The International Insitute of Islamic Thought
- _____, 1996. *What is Islamic Economics?*. No. 9 in the IDB Prize Winners' lecture Series. Jeddah: IRTI/IDB.
- _____, 2000. *The Future of Economics: an Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Hasan, Abul and Sadeq, Muhammad. 1987. *Economic Growth in an Islamic Economy*, Dalam Development and Finance in Islam. Malaysia: International Islamic University Press.
- _____, dan Ghazali, Aidit. 1992. *Readings in Islamic Economic Thought*. Malaysia: International Islamic University Press.
- Karim, Adiwarmen A. 2008. *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khan, Mohammad Akram. 1994. *An Introduction to Islamic Economics*. Virginia: International Institute of Islamic Thought.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1986. *Islamic Economics: Theory and Practice*, Delhi: Idarah-I Adabiyat-I.
- Misanam, Munrokhim, dkk. 2008. *Ekonomi Islam*. Edisi I. Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 1994. *Islam, Economics, and Society*. New York: Kegan Paul International.
- Nuryanto. 2006. *Ekonomi Syariah Di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Yogyakarta: BPFE.
- Pertadireja, 1994. *Pengantar Ekonomika*. Yogyakarta: BPFE.
- Rahman, Afzalur, 1995. *Economic Doctrines of Islam*. Terj. Doktrin Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Siddiqi, Mohammad Nejatullah. 1992. *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. UK: The Islamic Foundation.
- Zamman, Hasanuz, 1984. *Economics Function of an Islamic State*. Leicester: The Islamic Foundation.